

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Fitri. 2015. Dampak Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara: Medan
- Cory, Astry. 2014. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan). Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang. <http://jimfeb.ub.ac.id>. Diakses 28 Februari 2019.
- Emanuel, A. W. R. 2017. *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Teknologi Informasi*. Yogyakarta: ANDI
- Gina, S. M. 2017. Analisis Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus di KPP Pratama Pondok Gede). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara: Jakarta
- Hakim, Fadli dan Grace B. Nangoi. 2015. Analisis Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado, Jurnal EMBA, Vol.3 No.1, hal 787-795.
- Kementrian Keuangan. 2019. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018*. www.kemenkeu.go.id/apbn2018. Jakarta. Diakses 28 Februari 2019.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan (Edisi Terbaru 2018)*. Yogyakarta: ANDI
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. 2016. *Metodologi Penelitian: Memberi bekal teoritis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Puspa, Dian. 2016. *PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)*. <https://www.online-pajak.com/pajak-penghasilan-pph-pasal-4-ayat-2-a>. Diakses 28 Februari 2019.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sekretariat Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 93. Jakarta. Diakses 27 Februari 2019.

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sekretariat Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2018, No. 89. Jakarta. Diakses 27 Februari 2019.

Republik Indonesia. 2018. PMK No. 99/PMK.03/2018. Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Menimbang Mengingat Peredaran Bruto Tertentu. Sekretariat Negara. Berita Negara RI Tahun 2018, No. 1146 Jakarta. Diakses 27 Februari 2019.

Resmi, S. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat

Sembiring, L. J. 2018. *Target Penerimaan Pajak 2018: Ambisius dan Sulit Tercapai*. <https://economy.okezone.com/read/2018/01/08/20/1841704/target-penerimaan-pajak-2018-ambisius-dan-sulit-tercapai>. Diakses 23 Februari 2019.

Tjali, Widya. 2015. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Bitung, Jurnal EMBA, Vol.3 No. 4, hal 369376.

Yuniartha, L. 2019. *Pasca Tarif Pajak UMKM Turun Jadi 0,5% Jumlah Wajib Pajak Meningkat*. <https://nasional.kontan.co.id/news/pasca-tarif-pajak-umkm-turun-jadi-05-jumlah-wajib-pajak-meningkat>. Diakses 23 Februari 2019.